EVALUASI RENJA
TRIBULAN IV TAHUN 2024



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

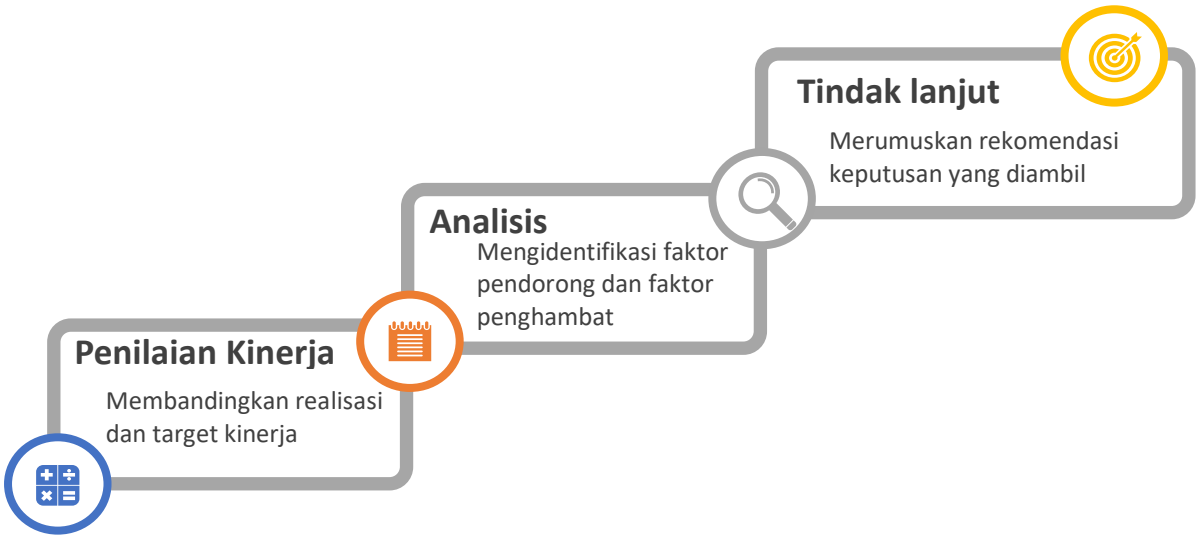
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sampai Triwulan IV melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah menilai capaian target kinerja, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dilaksanakan Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika, sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan;
2. BAB II Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024;
3. BAB III Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja;
4. BAB IV Penutup; dan
5. Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

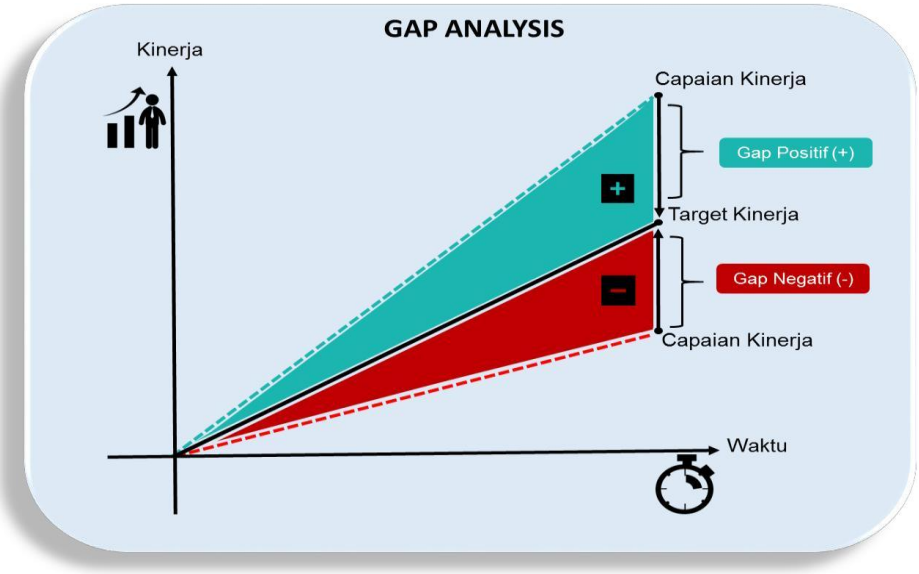
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai, sebagai berikut :

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut :

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



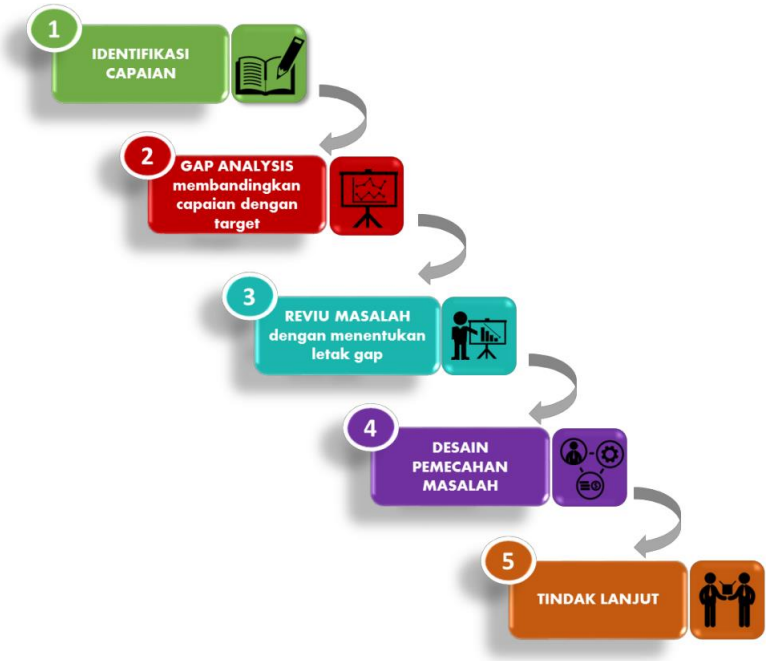
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk :

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis* :

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif.
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat, maka Evaluasi Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2024 (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94%	96,97%	100,03%
2	**Sasaran :** Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	96,94%	96,97%	100,03%
		Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	28,23%	75,85%	268,67%

Pencapaian tujuan/sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja tujuan/sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja tujuan/sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi indikator tujuan meningkatnya akses hunian yang layak terealisasi sebesar 96,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 100,03%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

2. Realisasi indikator sasaran Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 96,97% dari target yang telah ditetapkan sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 100,03%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah total rumah di kali 100%.

3. Realisasi indikator sasaran Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh terealisasi sebesar 75,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 28,23% dengan tingkat capaian sebesar 268,67%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK

dikurangi Luas Tahun n dibagi dengan Luas Total Kawasan Kumuh Dalam SK dikali 100%.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas PRKPP	84 (A)	77,50 (BB)	92,26%

Dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja “Nilai SAKIP Dinas PRKPP” yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 84 (A) pada Tribulan IV realisasi nilai 77,50 (BB). Beberapa komponen penilaian SAKIP, sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja, bobot 30%, nilai hasil evaluasi 23,70
2. Pengukuran kinerja, bobot 30%, nilai hasil evaluasi 22,20
3. Pelaporan kinerja, bobot 15%, nilai hasil evaluasi 11,10
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25%, nilai hasil evaluasi 20,50

Sehingga dari bobot keseluruhan 100% dengan nilai SAKIP sebesar 84 (A), realisasi Dinas PRKPP mendapatkan nilai hasil evaluasi sebesar 77,50 (BB), dengan capaian sebesar 92,26%.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sebanyak 8 dokumen, antara lain :
    a. Dokumen Perencanaan terdiri dari :
        1). Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
        2). Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra);
        3). Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja);
        4). Dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah.

b. Dokumen Penyusunan RKA SKPD;
c. Dokumen Penyusunan RKA-Perubahan SKPD;
d. Dokumen Penyusunan DPA SKPD;
e. Dokumen Penyusunan DPA-Perubahan SKPD;
f. Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, terdiri dari :
   1). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
   2). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
   3). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   4). Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
   5). Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
g. Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Dialog Kinerja.

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan hasil jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun yaitu sebanyak 6 dokumen. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV, sebagai berikut :
   a. Tersusunnya laporan fungsional untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2024;
   b. Tersusunnya laporan administratif untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2024;
   c. Tersusunnya laporan pajak untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun 2024;
   d. Tersusunnya laporan keuangan triwulan I, laporan keuangan triwulan II, laporan keuangan triwulan III dan laporan keuangan triwulan IV Tahun 2024;
   e. Tersusunnya laporan keuangan semester I dan laporan keuangan semester II Tahun 2024;

f. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun 2024.

3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan keluaran jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, target yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 50 orang. Realisasi sampai dengan Tribulan IV sebanyak 41 orang melalui kegiatan *capacity building,* bimtek dan diklat teknis. Adapun selebihnya karena pegawai purna tugas.

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan hasil jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang dipenuhi sebanyak 7 dokumen. Adapun keluaran dan realisasi sampai dengan triwulan IV, sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 6 paket, dengan realisasi sebanyak 6 kali penyerapan dalam 1 tahun;
   b. Keluaran jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 paket, terdiri dari Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Kebersihan dan Natura-Pakan lainnya. Adapun realisasi penyerapan tiap bulan sekali;
   c. Keluaran jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi penyerapan tiap bulan sekali;
   d. Keluaran jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi penyerapan sebanyak 1 dokumen berupa surat kabar;
   e. Keluaran jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 3 laporan, terdiri dari snack harian, makan dan minum rapat serta makan dan minum jamuan tamu;
   f. Keluaran jumlah laporan peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi penyerapan berupa pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah pejabat eselon II dan eselon III maupun pelaksana;
   g. Keluaran jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi penyerapan sebanyak 1 kali pembelanjaan box arsip.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan hasil jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan sebanyak 36 unit. Adapun keluaran sampai dengan triwulan IV, sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 30 unit;
   b. Keluaran jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 6 unit, berdasarkan kode rekening belanja modal sebagai berikut:
      1). Belanja modal peralatan dan mesin;
      2). Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
      3). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
      4). Belanja modal komputer;
      5). Belanja modal peralatan komputer;
      6). Belanja modal alat pengeboran (GPS).

6. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan hasil jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun sebanyak 12 laporan, dengan keluaran jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi sampai dengan triwulan IV, sebanyak 12 laporan.

7. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan hasil jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara sebanyak 23 unit. Adapun keluaran dan realisasi sampai dengan triwulan IV, sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit, tidak ada realisasi pemeliharaan;
   b. Keluaran jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 15 unit, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV yakni kendaraan roda empat yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 11 unit;

c. Keluaran jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 5 unit, sebagai berikut :
   1). Pemeliharaan mebel sampai dengan triwulan IV sebanyak 40 unit;
   2). Pemeliharaan alat pendingin (AC) sampai dengan triwulan IV sebanyak 35 unit;
   3). Pemeliharaan komputer sampai dengan triwulan IV sebanyak 14 unit;
   4). Pemeliharaan laptop sampai dengan triwulan IV sebanyak 16 unit;
   5). Pemeliharaan printer sampai dengan triwulan IV sebanyak 20 unit.

d. Keluaran jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit, dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak 1 unit.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase backlog rumah	8%	7,60%	95%

Dalam pelaksanaan program pengembangan perumahan dengan indikator kinerja persentase backlog rumah yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 8% pada triwulan IV telah terealisasi sebesar 7,60%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 95% Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dengan hasil jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen, sedangkan keluaran sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :
   a. Keluaran jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah sebanyak 1 dokumen;
   b. Keluaran jumlah dokumen data rumah di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.

2. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, dengan hasil jumlah rumah beserta PSU korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dibangun dan direhabilitasi sebanyak 91 unit rumah, dengan uraian sebagai berikut :
   a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dianggarkan kembali pada P-APBD;
   b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana tidak dianggarkan kembali pada P-APBD;
   c. Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan tersebut digunakan untuk rehabilitasi atau perbaikan kerusakan pada rumah khusus yang ada di Kabupaten Nganjuk, pada Triwulan IV realisasi tertangani sejumlah 10 unit rumah;
   d. Sedangkan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dibiayai dari anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga).
3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan hasil jumlah laporan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 1 laporan, dan keluaran jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 1 dokumen;
4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan hasil jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan sebanyak 10 dokumen, dan keluaran jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik sebanyak 10 dokumen. Adapun sampai dengan Triwulan IV sudah ada 10 dokumen (Rekomendasi Siteplan) yang diterbitkan;
5. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dengan hasil jumlah laporan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) sebanyak 1 laporan, dan keluaran jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB) sebanyak 1 laporan.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan	14,11%	14,05%	99,57%

Dalam pelaksanaan program kawasan permukiman dengan indikator kinerja persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar 14,11%. Pada tribulan IV telah terealisasi sebesar 14,05%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 99,57%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dengan hasil laporan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman sebanyak 1 laporan;

2. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dengan hasil jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/tereview/terlegalisasi sebanyak 1 dokumen;

3. Kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan hasil jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan sebanyak 72,32 Ha.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	6,73%	6,72%	99,85%

Dalam pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan indikator kinerja persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar 6,73%. Pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 6,72%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 99,85%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dengan hasil jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha sebanyak 1.060 unit rumah, dengan uraian sebagai berikut :
   a. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN sebanyak 770 unit rumah;
   b. Kegiatan Bantuan Sosial Penyediaan Rumah Layak Huni yang bersumber dari APBD :
      1). Kegiatan Bantuan Sosial Penyediaan Rumah Layak Huni di luar kawasan kumuh sebanyak 167 unit rumah dan 62 unit rumah (P-APBD 2024);
      2). Kegiatan Bantuan Sosial Penyediaan Rumah Layak Huni di dalam kawasan kumuh :
         a). Pembangunan rumah baru layak huni sebanyak 14 unit rumah;
         b). Perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 47 unit rumah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang terfasilitasi PSU	5%	4,79%	95,8%

Dalam pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan indikator kinerja persentase perumahan yang terfasilitasi PSU yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebanyak 5%, dengan realisasi pada Tribulan IV sebesar 4,79%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 95,8%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan dengan hasil jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 9 lokasi. Adapun sampai dengan Tribulan IV perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian sebanyak 9 lokasi, diantaranya :
    a. Pembangunan PSU Drainase di Perumahan GANUNG ASRI;
    b. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan NUANSA KAPAS ASRI;
    c. Pembangunan PSU Jalan Menuju Perumahan TAQIYA LAND;
    d. Pembangunan PSU Jalan Paving di Perumahan VILLA CANDI MAS;
    e. Pembangunan RPTRA di Perumahan Green Werungotok Residence;
    f. Pembangunan RPTRA di Perumahan Griya Mastrip Regency;
    g. Pembangunan PSU Perumahan NUANSA KAPAS ASRI, berupa pagar dan paving;
    h. Pembangunan PSU Jalan Paving di Perumahan MASTRIP MEGAH PREMIUM;
    i. Pembangunan RPTRA di Perumahan GREEN SAFIRA REGENCY.

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
6	Program Penatagunaan Tanah	Presentase Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	100%	77,72%	77,72%

Dalam pelaksanaan program penatagunaan tanah dengan indikator kinerja presentase permasalahan pertanahan yang difasilitasi yang ditargetkan pada Tahun 2024, sebesar 100% pada Tribulan IV telah terealisasi sebesar 77,72%, maka diperoleh persentase capaian sebesar 77,72%. Pencapaian program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan keluaran jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah sebanyak 1 (satu) dokumen dan keluaran jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) laporan. Adapun sampai dengan Tribulan IV Tahun 2024 permasalahan pertanahan yang difasilitasi diantaranya :
    a. Pelaksanaan Tata Batas Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) oleh Jasa Konsultansi;
    b. Pelaksanaan tata batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh Badan Pengelolaan Kehutanan dan Lingkungan Yogyakarta.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Tujuan :** Meningkatnya akses hunian yang layak		
	Indikator : Persentase Rumah Layak Huni	Terbentuknya Forum dan Pokja PKP, sehingga diharapkan mampu menjembatani penyampaian permasalahan yang timbul pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk kepada para pengambil kebijakan dalam pemenuhan akses hunian yang layak	Permasalahan perumahan dan permukiman belum menjadi atensi dan isu strategis dari para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait
2	**Sasaran :** Meningkatnya akses hunian yang layak		
	Indikator : Persentase Rumah Layak Huni	1. Adanya SKB Menteri PKP dan Mendagri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah 2. Tambahan alokasi BSPS sebanyak 770 unit rumah 3. Investasi dari developer terhadap penyediaan rumah di Kabupaten Nganjuk	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan
	Indikator : Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	Adanya kolaborasi intervensi kegiatan di wilayah kumuh dari Dinas	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk

		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	berperilaku hidup bersih dan sehat

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kinerja perangkat daerah sedikit terhambat ketika sedang mengimplementasikan kegiatan yang menggunakan aplikasi SIPD, sementara aplikasi sedang error
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak ada hambatan, namun terkadang muncul kendala SIPD error pada saat digunakan, sehingga target ketuntasan tugas menjadi mundur
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sinergitas terjalin secara harmonis pada Dinas PRKPP, sehingga koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD tidak ada hambatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan,	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD tidak ada hambatan dan berjalan lancer

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD tidak ada hambatan dan berjalan sesuai target
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD tidak ada hambatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua bidang pada Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk saling sinergi dalam koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, sehingga tidak muncul permasalahan dalam pelaksanaannya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aplikasi SIPD merupakan salah satu aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan diterapkannya aplikasi SIPD tersebut mempermudah proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tidak ada hambatan dalam melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Koordinasi dengan BPKAD berjalan lancar, sehingga tidak ada hambatan dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan koordinasi antar pihak berjalan lancar, sehingga menjadi salah satu faktor	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada Dinas PRKPP menunggu hasil validasi dari BPKAD

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		pendorong tersusunnya laporan keuangan akhir tahun pada Dinas PRKPP	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Evaluasi realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan koordinasi antar pihak berjalan lancar, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran pada DinasPRKPP	Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran pada Dinas PRKPP menunggu hasil validasi dari BPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyelenggaraan kegiatan *Carakter Building* pada Dinas PRKPP menjadi salah satu pendidikan dan pelatihan non formal untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan semua pegawai, sehingga diharapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PRKPP memiliki motivasi untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan secara formal	Kurangnya antusias dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan penerangan bangunan kantor	Tidak ada hambatan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penyediaan bahan logistik kantor	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga kebutuhan logistik kantor tercukupi
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan barang cetakan dan penggandaan bisa terlaksana	Tidak ada hambatan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan baik, sehingga kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tercukupi	Tidak ada hambatan dalam penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penyediaan kebutuhan untuk fasilitasi kunjungan tamu	Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga penyediaan kebutuhan untuk fasilitasi kunjungan tamu tercukupi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD bersifat rutin dan berulang, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pelaksanaan sebelumnya	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berjalan lancar
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya aplikasi srikandi sebagai aplikasi surat menyurat di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah penatausahaan arsip dinamis pada Dinas PRKPP	Pada situasi yang bersifat penting/segera, kemudian terjadi gangguan/error pada aplikasi srikandi, sehingga berdampak pada proses surat menyurat tidak berjalan lancar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah pengadaan mebel pada Dinas PRKPP	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga pengadaan mebel pada Dinas PRKPP tercukupi
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya aplikasi LPSE sebagai aplikasi pengadaan barang dan jasa di Pemda Nganjuk, sehingga mempermudah pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas PRKPP	Koordinasi dengan penyedia jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Nganjuk berjalan baik, sehingga pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas PRKPP tercukupi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi dengan penyedia jasa berjalan lancar, sehingga penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas PRKPP terlaksana dengan baik	Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas PRKPP tercukupi dan tidak ada kendala dalam penyediaannya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan bersifat rutin, sehingga	Tidak ada hambatan dalam penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Tidak ada hambatan dalam penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas opersional atau lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Tidak ada hambatan dalam pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya bersifat rutin, sehingga diantisipasi hambatan-hambatan berdasarkan pengalaman sebelumnya	Kerusakan gedung tidak bisa diprediksi sebelumnya, namun tetap dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Diperlukan assessment rumah korban bencana untuk menentukan besaran bantuan	Prosedur pencairan bantuan yang semakin panjang karena harus ada verifikasi dan validasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta review dari Inspektorat
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten	Prosedur pencairan bantuan yang semakin panjang karena harus ada verifikasi dan validasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta review dari Inspektorat

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten	Prosedur pencairan bantuan yang semakin panjang karena harus ada verifikasi dan validasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta review dari Inspektorat
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Prosedur pencairan bantuan yang semakin panjang karena harus ada verifikasi dan validasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta review dari Inspektorat
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)	- (Dalam proses pemberian bantuan difasilitasi dengan anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran subkegiatan akan dihilangkan)
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Mewujudkan Lingkungan yang layak dan berkualitas di Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Beberapa rumah dan lingkungan perumahan rusak berat sehingga anggaran tidak

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			bisa menyelesaikan secara menyeluruh
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	- (Anggaran subkegiatan dihilangkan untuk efisiensi pagu OPD)	- (Anggaran subkegiatan dihilangkan untuk efisiensi pagu OPD)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Adanya Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur sewa/retribusi	Masyarakat penerima manfaat rumah khusus adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya aplikasi sebagai inovasi percepatan Pelayanan Rekomendasi Siteplan dan Penyerahan PSU Perumahan Formal	Antusias dari pemohon ijin rendah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Diperlukan penyusunan dokumen RP3KP	Proses Perda yang melibatkan DPRD
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Agar masyarakat dapat memproses PBG Hunian dan SLF	Persyaratan dalam memproses PBG Hunian dan SLF yang komplek dan waktu penyelesaian yang Panjang
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder yang terlibat dalam pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, sehingga jelas pembagian kewenangan dan fokus penanganannya	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan, perlu penguatan koordinasi melalui Pokja/Forum PKP kabupaten Nganjuk
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait penataan	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan, selanjutnya akan direncanakan penyusunan

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sehingga pembangunan dapat terarah	dokumen RP2KPKPK untuk Keputusan Bupati atas lokasi kumuh baru di Tahun 2025
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif terkait penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sehingga penanganan kumuh dapat terarah	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan, sudah ada lokasi indikatif kumuh baru untuk ditetapkan Keputusan Bupati di Tahun 2025
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan berupa bantuan sosial perbaikan RTLH di kawasan kumuh, dengan capaian kinerja 99%.
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan berupa bantuan sosial pembangunan RLH di kawasan kumuh, dengan capaian kinerja 100%.
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Salah satu strategi pengurangan kawasan kumuh adalah dengan menyediakan fasilitas infrastruktur di perumahan dan permukiman kumuh berupa pembangunan jalan/drainase lingkungan sesuai kewenangan daerah	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan, dengan perhitungan sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2024 sebesar ±37,65 Ha terhadap SK Kumuh awal tahun 2023 sebesar 155,88 Ha yang merupakan perhitungan capaian dari kolaborasi intervensi dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai Tusi
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah (daerah) wajib mendukung ketersediaan rumah layak huni melalui stimulan bagi masyarakat untuk perbaikan maupun pembangunannya	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan berupa bantuan sosial perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh, dengan capaian kinerja 99%.
5	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Data perumahan beserta PSU yang terus diperbarui dan beberapa perumahan yang belum terdaftar dan terdata
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PSU perumahan merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Banyak perumahan yang belum diserahkan kepada Pemda, sehingga secara hukum Pemda belum boleh intervensi melalui APBD untuk pembangunan/perbaikan PSU Perumahan
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Usulan penyerahan PSU dari pengembang perumahan	Belum seluruh PSU Perumahan diserahkan kepada Pemda
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan aman bagi penghuni perumahan.	Belum selesainya persyaratan yang harus dipenuhi dari Pihak pengembang
6	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Agar masyarakat yang menempati tanah relokasi Bendungan Semantok dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka TMKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Proses administrasi penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan saat ini ada di Kementerian Kehutanan, karena pemenuhan komitmen oleh Bupati sudah selesai meliputi penataan batas lahan pengganti dan rehabilitasi DAS

No	Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			atas kekurangan lahan pengganti serta penyusunan rancangan teknis reboisasi lahan pengganti di Kabupaten Bondowoso
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Agar masyarakat yang menempati tanah dalam kawasan hutan dapat segera memiliki alas hak yang sah, maka PPTPKH dapat menjadi kegiatan prioritas Kabupaten	Belum jelasnya tindaklanjut atas surat permohonan Bupati Nganjuk terkait verifikasi dan validasi lapangan atas sisa usulan PPTPKH oleh KLHK, sehingga anggaran kegiatan yang tersedia belum bisa dioptimalkan

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Tribulan IV Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu antisipasi sejak dini untuk upaya-upaya perbaikan dan penyesuaian melalui evaluasi secara berkala setiap bulannya secara intens dan konsisten serta berkoordinasi antar bagian dan sekretaris Dinas PRKPP dan Pimpinan Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk selaku pihak yang dilayani dan yang melayaninya.

Akhirnya melalui laporan evaluasi Rencana Kerja Tribulan IV Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tribulan selanjutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan tindaklanjut adalah perlunya penyediaan jaringan internet yang handal, sehingga bisa diminimalisir gangguan pada Aplikasi SIPD;
2. Program Pengembangan Perumahan
   a. Lamanya proses pencairan BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah terdampak bencana adalah dengan melakukan review :
      1). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

2). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

b. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada penerima manfaat rumah khusus milik Pemda, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari retribusi pemanfaatan BMD (Barang Milik Daerah);

c. Melakukan terobosan terkait proses pengurusan PBG/SLF yang dinilai masih sangat Panjang dan persyaratan yang komplek;

3. Program Kawasan Permukiman
   a. Meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait (Dinas/Instansi/Desa/Masyarakat) dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kumuh dan pencegahan timbulnya lingkungan kumuh baru.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas
   a. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan paguyuban pengembang/developer untuk serahterima PSU.

5. Program Penatagunaan Tanah
   a. Mengakselerasi pemenuhan komitmen Pemda Nganjuk sesuai ijin prinsip dari KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), yaitu kewajiban rehabilitasi dan reboisasi lahan pengganti di Bondowoso dalam rangka mempercepat proses TMKH (Tukar Menukar Kawasan Hutan) antara

lahan relokasi warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok dengan lahan pengganti di Bondowoso

Nganjuk, 08 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

SUPARDI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19670812 199202 1 002

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Nganjuk
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang mengacu pada sasaran RKPD :

1. Persentase Rumah Layak Huni = 96,94%
2. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh = 28,23%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Catatan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																												
1	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas PRKPP**	**86 (A)**	**24,762,399,882**	**79%**	**5,677,509,321**	**84 Nilai**	**6,609,454,350**		**552,604,522**	**77,50 Nilai**	**1,974,634,424**	**77,50 Nilai**	**1,477,282,072**	**77,50 Nilai**	**1,384,112,655**	**77,50 Nilai**	**5,388,633,673**	**92.26%**	**81.53%**	**77,50 Nilai**	**5,388,633,673**	**90.12%**	**21.76%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**24 dokumen**	**169,000,000**	**8 dokumen**	**37,463,000**	**8 dokumen**	**46,490,000**	**0 dokumen**	**-**	**5 dokumen**	**21,476,000**	**5 dokumen**	**17,724,000**	**4 dokumen**	**4,873,000**	**8 dokumen**	**44,073,000**	**100.00%**	**94.80%**	**8 dokumen**	**44,073,000**	**33.33%**	**26.08%**	**DPRKPP**	Komulatif
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	12 dokumen	22,000,000	4 dokumen	4,957,000	4 dokumen	4,950,000	0 dokumen	-	4 dokumen	2,889,000	4 dokumen	2,058,000	0 dokumen	-	4 dokumen	4,947,000	100.00%	99.94%	4 dokumen	4,947,000	33.33%	22.49%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	22,000,000	1 dokumen	4,986,000	1 dokumen	4,950,000	0 dokumen	-	1 dokumen	3,264,000	1 dokumen	1,680,000	0 dokumen	0	1 dokumen	4,944,000	100.00%	99.88%	1 dokumen	4,944,000	33.33%	22.47%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	22,000,000	1 dokumen	4,950,000	1 dokumen	4,950,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	4,929,000	1 dokumen	0	1 dokumen	4,929,000	100.00%	99.58%	1 dokumen	4,929,000	33.33%	22.40%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	22,000,000	1 dokumen	4,983,000	1 dokumen	4,950,000	1 dokumen	-	1 dokumen	4,934,000	0 dokumen	-	0 dokumen	0	1 dokumen	4,934,000	100.00%	99.68%	1 dokumen	4,934,000	33.33%	22.43%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	22,000,000	1 dokumen	4,983,000	1 dokumen	4,950,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	4,932,000	1 dokumen	0	1 dokumen	4,932,000	100.00%	99.64%	1 dokumen	4,932,000	33.33%	22.42%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	37,000,000	2 laporan	12,604,000	2 laporan	16,740,000	0 laporan	-	1 laporan	8,364,000	1 laporan	4,125,000	1 laporan	4,248,000	2 laporan	16,737,000	100.00%	99.98%	2 laporan	16,737,000	33.33%	45.24%	DPRKPP	Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Catatan
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	22,000,000	0 laporan	-	1 laporan	5,000,000	0 laporan	-	1 laporan	2,025,000	0 laporan	-	1 laporan	625,000	1 laporan	2,650,000	100.00%	53.00%	1 laporan	2,650,000	33.33%	12.05%	DPRKPP	**Tidak Komulatif**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**20,895,070,000**	**6 Dokumen**	**4,295,470,444**	**6 Dokumen**	**5,091,464,000**	**0 Dokumen**	**442,461,924**	**5 dokumen**	**1,574,906,329**	**5 dokumen**	**1,014,684,447**	**1 Dokumen**	**1,061,812,741**	**6 Dokumen**	**4,093,865,441**	**100.00%**	**80.41%**	**6 Dokumen**	**4,093,865,441**	**33.33%**	**19.59%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bulan	20,851,070,000	35 orang	4,285,579,444	35 orang/bulan	5,081,564,000	31 orang	442,461,924	35 orang	1,568,687,329	35 orang	1,012,257,447	35 orang	1,060,597,741	35 orang	4,084,004,441	100.00%	80.37%	35 orang	4,084,004,441	23.33%	19.59%	DPRKPP	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 laporan	22,000,000	3 Laporan	4,926,000	3 Laporan	4,950,000	0 Laporan	-	3 Laporan	4,941,000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	3 Laporan	4,941,000	100.00%	99.82%	3 Laporan	4,941,000	33.33%	22.46%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 laporan	22,000,000	3 Laporan	4,965,000	3 Laporan	4,950,000	0 Laporan	-	1 laporan	1,278,000	1 laporan	2,427,000	1 laporan	1,215,000	3 laporan	4,920,000	100.00%	99.39%	3 laporan	4,920,000	33.33%	22.36%	DPRKPP	Komulatif
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**150 Orang**	**37,000,000**	**35 orang**	**8,500,000**	**43 Dokumen**	**23,300,000**	**31 orang**	**1,225,000**	**35 orang**	**1,225,000**	**42 orang**	**6,625,000**	**41 orang**	**6,125,000**	**41 orang**	**15,200,000**	**97.67%**	**65.24%**	**41 orang**	**15,200,000**	**28.00%**	**41.08%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	37,000,000	35 orang	8,500,000	43 orang	23,300,000	31 orang	1,225,000	35 orang	1,225,000	42 orang	6,625,000	41 orang	6,125,000	41 orang	15,200,000	97.67%	65.24%	41 orang	15,200,000	28.00%	41.08%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**21 dokumen**	**1,003,000,000**	**3 paket**	**424,317,386**	**13 dokumen**	**425,822,350**	**3 dokumen**	**38,162,422**	**3 dokumen**	**108,576,278**	**3 dokumen**	**122,495,574**	**4 dokumen**	**115,567,530**	**13 Dokumen**	**384,801,804**	**100.00%**	**90.37%**	**13 Dokumen**	**384,801,804**	**61.90%**	**38.37%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	22,000,000	6 paket	4,880,000	6 paket	4,917,500	6 paket	687,500	0 paket	-	6 paket	1,678,000	6 paket	2,532,000	6 paket	4,897,500	100.00%	99.59%	6 paket	4,897,500	33.33%	22.26%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	310,000,000	3 paket	86,179,370	12 paket	147,642,450	3 paket	15,636,600	3 paket	31,982,850	3 paket	39,908,520	3 paket	52,032,270	12 paket	139,560,240	100.00%	94.53%	12 paket	139,560,240	133.33%	45.02%	DPRKPP	Komulatif
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	127,000,000	1 paket	38,947,750	12 paket	44,618,200	3 paket	1,494,250	3 paket	17,502,100	3 paket	9,332,600	3 paket	8,997,250	12 paket	37,326,200	100.00%	83.66%	12 paket	37,326,200	400.00%	29.39%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	28,000,000	3 dokumen	4,868,000	12 dokumen	5,900,000	3 dokumen	960,000	3 dokumen	1,472,000	3 dokumen	1,472,000	3 dokumen	1,952,000	12 dokumen	5,856,000	100.00%	99.25%	12 dokumen	5,856,000	100.00%	20.91%	DPRKPP	Komulatif
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan	9 laporan	22,000,000	3 laporan	2,573,315	12 laporan	5,210,700	3 laporan	433,690	3 laporan	2,662,710	3 laporan	610,950	3 laporan	1,095,710	12 laporan	4,803,060	100.00%	92.18%	12 laporan	4,803,060	133.33%	21.83%	DPRKPP	Komulatif
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	472,000,000	9 laporan	232,048,901	12 laporan	207,533,500	3 laporan	18,950,382	3 laporan	54,956,618	3 laporan	69,493,504	3 laporan	39,553,300	12 laporan	182,953,804	100.00%	88.16%	12 laporan	182,953,804	400.00%	38.76%	DPRKPP	Tidak Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9 dokumen	22,000,000	3 dokumen	54,820,050	1 dokumen	10,000,000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	9,405,000	1 dokumen	9,405,000	100.00%	94.05%	1 dokumen	9,405,000	11.11%	42.75%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**108 unit**	**674,000,000**	**20 unit**	**217,270,000**	**58 unit**	**253,466,200**	**0 unit**	**-**	**55 unit**	**171,480,000**	**unit**	**18,750,000**	**3 unit**	**49,109,998**	**58 unit**	**239,339,998**	**94.83%**	**94.43%**	**58 unit**	**239,339,998**	**53.70%**	**35.51%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	90 unit	157,000,000	4 unit	100,500,000	43 unit	60,367,700	0 unit	-	43 unit	58,380,000	0 unit	-	0 unit	-	43 unit	58,380,000	100.00%	96.71%	43 unit	58,380,000	47.78%	37.18%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	517,000,000	16 Unit	116,770,000	31 unit	193,098,500	0 unit	-	28 unit	113,100,000	0 unit	18,750,000	3 Unit	49,109,998	31 unit	180,959,998	90.32%	93.71%	31 unit	180,959,998	155.56%	35.00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 laporan**	**262,000,000**	**12 laporan**	**118,168,279**	**12 laporan**	**150,400,000**	**3 laporan**	**21,601,902**	**3 laporan**	**20,116,941**	**3 laporan**	**25,633,107**	**3 laporan**	**23,241,808**	**12 laporan**	**90,593,758**	**100.00%**	**60.24%**	**12 laporan**	**90,593,758**	**33.33%**	**34.58%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	262,000,000	12 laporan	118,168,279	12 laporan	150,400,000	3 laporan	21,601,902	3 laporan	20,116,941	3 laporan	25,633,107	3 laporan	23,241,808	12 laporan	90,593,758	100.00%	60.24%	12 laporan	90,593,758	33.33%	34.58%	DPRKPP	komulatif
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang terpelihara**	**69 unit**	**1,722,329,882**	**9 unit**	**576,320,212**	**22 unit**	**618,511,800**	**5 unit**	**49,153,274**	**5 unit**	**76,853,876**	**7 unit**	**271,369,944**	**5 unit**	**123,382,578**	**22 unit**	**520,759,672**	**95.65%**	**84.20%**	**22 unit**	**520,759,672**	**31.88%**	**30.24%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	345,329,882	1 unit	80,333,708	1 unit	121,236,000	1 unit	14,494,500	1 unit	13,121,200	1 unit	16,484,000	1 unit	19,286,877	1 unit	63,386,577	100.00%	52.28%	1 unit	63,386,577	33.33%	18.36%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	652,000,000	9 unit	193,702,504	15 unit	240,375,800	3 unit	29,848,774	4 unit	49,880,676	4 unit	46,261,244	4 unit	75,661,701	15 unit	201,652,395	100.00%	83.89%	15 unit	201,652,395	33.33%	30.93%	DPRKPP	komulatif
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	118,000,000	4 unit	52,705,000	5 unit	56,900,000	5 unit	4,810,000	5 unit	5,860,000	5 unit	17,075,000	5 unit	28,434,000	5 unit	56,179,000	100.00%	98.73%	5 unit	56,179,000	33.33%	47.61%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	607,000,000	2 unit	249,579,000	1 unit	200,000,000	0 unit	-	1 unit	7,992,000	1 unit	191,549,700	0 unit	-	1 unit	199,541,700	100.00%	99.77%	1 unit	199,541,700	16.67%	32.87%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase backlog rumah**	**7%**	**8,940,000,000**	**91.52%**	**2,057,587,585**	**8%**	**1,033,755,000**	**0.13%**	**16,752,261**	**0.53%**	**68,079,710**	**5.36%**	**692,532,994**	**1.59%**	**205,300,429**	**7.60%**	**982,665,394**	**95.06%**	**95.06%**	**7.60%**	**982,665,394**	**108.64%**	**10.99%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**5 dokumen**	**450,000,000**	**1 dokumen**	**178,897,865**	**3 dokumen**	**228,260,000**	**0 dokumen**	**5,293,000**	**1 dokumen**	**2,225,000**	**2 dokumen**	**211,830,620**	**1 dokumen**	**5,146,940**	**3 dokumen**	**224,495,560**	**100.00%**	**98.35%**	**3 dokumen**	**224,495,560**	**60.00%**	**49.89%**	**DPRKPP**	**tidak Komulatif**
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	3 dokumen	150,000,000	1 dokumen	111,397,865	1 dokumen	28,260,000	1 dokumen	5,293,000	1 dokumen	2,225,000	1 dokumen	12,650,000	1 dokumen	5,146,940	1 dokumen	25,314,940	100.00%	89.58%	1 dokumen	25,314,940	33.33%	16.88%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 dokumen	300,000,000			1 dokumen	100,000,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	99,900,000		-	1 dokumen	99,900,000	100.00%	99.90%	1 dokumen	99,900,000	50.00%	33.30%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1 dokumen	100,000,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	99,280,620		-	1 dokumen	99,280,620	100.00%	99.28%	1 dokumen	99,280,620	100.00%	99.28%	DPRKPP	Tidak Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi**	**534 unit rumah**	**6,040,000,000**	**95 Unit rumah**	**1,756,491,660**	**20 unit rumah**	**208,960,000**	10 unit rumah	**2,067,000**	10 unit rumah	**23,454,840**	10 unit rumah	**18,364,780**	10 unit rumah	**144,300,000**	10 unit rumah	**188,186,620**	**50.00%**	**90.06%**	10 unit rumah	**188,186,620**	**1.87%**	**3.12%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	150 unit	900,000,000	0	-	0 unit rumah	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0.00%	0.00%	0 unit	-	0.00%	0.00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana	19 unit	600,000,000	0	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit	-	0 unit rumah	-	0.00%	0.00%	0 unit rumah	-	0.00%	0.00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	65 unit	652,000,000	20 unit rumah	214,332,300	20 unit rumah	208,960,000	10 unit rumah	2,067,000	10 unit rumah	23,454,840	10 unit rumah	18,364,780	10 unit rumah	144,300,000	10 unit rumah	188,186,620	50.00%	90.06%	10 unit rumah	188,186,620	15.38%	28.86%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	300 unit	3,888,000,000	75 unit rumah	1,542,159,360	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0 unit rumah	-	0.00%	0.00%	0 unit rumah	-	0.00%	0.00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**3 dokumen**	**150,000,000**	**0**	**-**	**1 laporan**	**11,054,000**	**1 laporan**	**1,000,000**	**1 laporan**	**600,000**	**1 laporan**	**4,015,300**	**1 laporan**	**1,820,000**	**1 laporan**	**7,435,300**	**100.00%**	**67.26%**	**1 laporan**	**7,435,300**	**33.33%**	**4.96%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	3 dokumen	150,000,000	0	-	1 dokumen	11,054,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	600,000	1 dokumen	4,015,300	1 dokumen	1,820,000	1 dokumen	7,435,300	100.00%	67.26%	1 dokumen	7,435,300	33.33%	4.96%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**30 dokumen**	**1,700,000,000**	**2 dokumen**	**96,278,795**	**10 dokumen**	**468,250,000**	**2 dokumen**	**1,125,000**	**6 dokumen**	**19,897,400**	**1 dokumen**	**412,121,500**	**1 dokumen**	**24,586,900**	**10 dokumen**	**457,730,800**	**100.00%**	**97.75%**	**10 dokumen**	**457,730,800**	**33.33%**	**26.93%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	30 dokumen	300,000,000	6 dokumen	50,600,155	10 dokumen	68,250,000	2 dokumen	1,125,000	6 dokumen	19,897,400	1 dokumen	12,696,500	1 dokumen	24,586,900	10 dokumen	58,305,800	100.00%	85.43%	10 dokumen	58,305,800	33.33%	19.44%	DPRKPP	Komulatif
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 laporan	1,400,000,000	1 laporan	45,678,640	1 laporan	400,000,000	0 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan	399,425,000	0 laporan	-	1 laporan	399,425,000	100.00%	99.86%	1 laporan	798,850,001	33.33%	57.06%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	**Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**3 laporan**	**600,000,000**	**1 laporan**	**28,700,420**	**1 laporan**	**117,231,000**	**1 laporan**	**7,267,261**	**1 laporan**	**21,902,470**	**1 laporan**	**46,200,794**	**1 laporan**	**29,446,589**	**1 laporan**	**104,817,114**	**100.00%**	**89.41%**	**1 laporan**	**104,817,114**	**33.33%**	**17.47%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 laporan	600,000,000	1 laporan	28,700,420	1 laporan	117,231,000	1 laporan	7,267,261	1 laporan	21,902,470	1 laporan	46,200,794	1 laporan	29,446,589	1 laporan	104,817,114	100.00%	89.41%	1 laporan	104,817,114	33.33%	17.47%	DPRKPP	Tidak Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan**	**42.33%**	**16,506,000,000**	**96.36%**	**9,386,905,570**	**14.11%**	**4,774,185,500**	**0.03%**	**8,928,800**	**6.45%**	**2,182,949,450**	**5.27%**	**1,782,461,530**	**2.31%**	**780,583,924**	**14.05%**	**4,754,923,704**	**99.60%**	**99.60%**	**14.05%**	**4,754,923,704**	**33.20%**	**28.81%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**		**-**	**1 dokumen**	**11,879,220**	**1 Laporan**	**16,415,000**	**1 laporan**	**1,541,200**	**1 laporan**	**645,550**	**1 laporan**	**8,420,000**	**1 laporan**	**3,370,000**	**1 laporan**	**13,976,750**	**100.00%**	**85.15%**	**1 laporan**	**13,976,750**	**100.00%**	**0.00%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0	-			1 laporan	16,415,000	1 laporan	1,541,200	1 laporan	645,550	1 laporan	8,420,000	1 laporan	3,370,000	1 laporan	13,976,750	100.00%	85.15%	1 laporan	13,976,750	100.00%	0.00%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**		**-**		**-**	**1 dokumen**	**428,800,000**	**1 dokumen**	**3,358,600**	**1 dokumen**	**7,165,000**	**1 dokumen**	**104,368,000**	**1 dokumen**	**306,016,500**	**1 dokumen**	**420,908,100**	**100.00%**	**98.16%**	**1 dokumen**	**420,908,100**	**100.00%**	**98.16%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		-			1 dokumen	118,800,000	1 dokumen	3,358,600	1 dokumen	7,165,000	1 dokumen	102,578,000	1 dokumen	1,225,500	1 dokumen	114,327,100	100.00%	96.23%	1 dokumen	114,327,100	100.00%	96.23%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		-		-	1 Dokumen	310,000,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	1,790,000	1 dokumen	304,791,000	1 dokumen	306,581,000	100.00%	98.90%	1 dokumen	306,581,000	100.00%	98.90%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan**	**30 lokasi**	**16,506,000,000**	**96.42%**	**9,375,026,350**	**30 lokasi**	**4,328,970,500**	**0 lokasi**	**4,029,000**	**0 lokasi**	**2,175,138,900**	**0 lokasi**	**1,669,673,530**		**471,197,424**	**0 lokasi**	**4,320,038,854**	**0.00%**	**99.79%**	**0 lokasi**	**4,320,038,854**	**0.00%**	**26.17%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 unit rumah	3,150,000,000	43 unit rumah	752,500,000	47 unit rumah	1,008,210,000	0 unit rumah	2,529,000	47 Unit	975,732,150	Unit	21,955,000	Unit	5,582,850	47 Unit	1,005,799,000	94.00%	99.76%	47 Unit	1,005,799,000	31.33%	**31.93%**	DPRKPP	Komulatif
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	45 unit rumah	1,417,500,000			14 unit	420,000,000	0 unit	-	14 Unit	420,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	14 Unit	420,000,000	93.33%	100.00%	14 Unit	420,000,000	31.11%	29.63%	DPRKPP	Komulatif
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	66 Ha	11,938,500,000	40 Ha	8,565,215,900	22 Ha	2,900,760,500	0 Ha	1,500,000	26,64 Ha	779,406,750	4,66 Ha	1,647,718,530	41,02 Ha	465,614,574	72,32 Ha	2,894,239,854	323.64%	99.78%	72,32 Ha	2,894,239,854	107.88%	24.24%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**12.49%**	**28,350,000,000**	**93.56%**	**5,082,899,207**	**6.73%**	**4,889,420,200**	**0.02%**	**14,773,522**	**4.77%**	**3,466,492,540**	**1.75%**	**1,272,640,132**	**0.18%**	**127,399,848**	**6.72%**	**4,881,306,042**	**99.83%**	**99.83%**	**6.72%**	**4,881,306,042**	**53.79%**	**17.22%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	**Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha**	**1350 unit rumah**	**28,350,000,000**	**268 unit rumah**	**5,082,899,207**	**229 unit rumah**	**4,889,420,200**	**0 unit rumah**	**14,773,522**	**167 unit rumah**	**3,466,492,540**	**59 unit rumah**	**1,272,640,132**	**3 unit rumah**	**127,399,848**	**167 unit rumah**	**4,881,306,042**	**37.11%**	**99.83%**	**167 unit rumah**	**4,881,306,042**	**12.37%**	**17.22%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Catatan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1350 unit rumah	28,350,000,000	268 unit rumah	5,082,899,207	229 unit rumah	4,889,420,200	0 unit rumah	14,773,522	167 Unit Rumah	3,466,492,540	59 Unit Rumah	1,272,640,132	3 Unit Rumah	127,399,848	229 unit rumah	4,881,306,042	100.00%	99.83%	229 unit rumah	4,881,306,042	16.96%	17.22%	DPRKPP	Komulatif
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU**	**15%**	**14,436,000,000**	**95.02%**	**3,403,515,548**	**5%**	**2,145,646,730**	**0.02%**	**9,617,261**	**1.62%**	**694,769,570**	**1.75%**	**752,772,406**	**1.39%**	**597,668,979**	**4.79%**	**2,054,828,216**	**95.77%**	**95.77%**	**4.79%**	**2,054,828,216**	**31.92%**	**14.23%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU**	**20 lokasi**	**14,436,000,000**	**8 Lokasi**	**3,403,515,548**	**9 lokasi**	**2,145,646,730**	**0 lokasi**	**9,617,261**	**1 lokasi**	**694,769,570**	**6 lokasi**	**752,772,406**	**2 lokasi**	**597,668,979**	**9 lokasi**	**2,054,828,216**	**45.00%**	**95.77%**	**9 lokasi**	**2,054,828,216**	**45.00%**	**14.23%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3 dokumen	360,000,000	1 Dokumen	74,720,870	1 dokumen	113,250,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	103,146,400	0 dokumen	-	1 dokumen	103,146,400	100.00%	91.08%	1 dokumen	103,146,400	33.33%	28.65%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 lokasi	13,176,000,000	13 Lokasi	3,147,740,060	9 lokasi	1,806,796,730	0 lokasi	-	1 lokasi	675,881,100	6 lokasi	566,730,320	2 lokasi	558,146,540	9 lokasi	1,800,757,960	100.00%	99.67%	9 lokasi	1,800,757,960	100.00%	13.67%	DPRKPP	Komulatif
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 laporan	450,000,000	1 laporan	112,952,589	1 laporan	116,200,000	0 laporan	8,717,261	1 laporan	15,297,470	1 laporan	42,057,006	1 laporan	28,036,199	1 laporan	94,107,936	100.00%	80.99%	1 laporan	94,107,936	33.33%	20.91%	DPRKPP	Tidak Komulatif
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	15 laporan	450,000,000	5 laporan	68,102,029	4 laporan	109,400,000	4 laporan	900,000	4 laporan	3,591,000	4 laporan	40,838,680	4 laporan	11,486,240	4 laporan	56,815,920	100.00%	51.93%	4 laporan	56,815,920	33.33%	12.63%	DPRKPP	Tidak Komulatif
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																											
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi**	**300%**	**2,720,000,000**	**71.33%**	**4,049,725,891**	**100%**	**3,279,878,000**	**0.60%**	**19,649,332**	**1.88%**	**61,551,461**	**57.80%**	**1,895,779,183**	**17.44%**	**572,015,707**	**77.72%**	**2,548,995,683**	**77.72%**	**77.72%**	**0.777**	**2,548,995,683**	**25.91%**	**93.71%**	**DPRKPP**	**Komulatif**
		Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota**	**3 dokumen**	**2,720,000,000**	**2 Dokumen**	**4,049,725,891**	**1 dokumen**	**3,279,878,000**	**0 dokumen**	**19,649,332**	**1 dokumen**	**61,551,461**	**1 dokumen**	**1,895,779,183**	**1 dokumen**	**572,015,707**	**1 dokumen**	**2,548,995,683**	**100.00%**	**77.72%**	**1 dokumen**	**2,548,995,683**	**33.33%**	**93.71%**	**DPRKPP**	**Tidak Komulatif**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	2,420,000,000	1 laporan	3,909,865,741	1 laporan	2,699,878,000	0 laporan	19,649,332	1 laporan	27,157,861	1 laporan	1,883,556,683	1 laporan	572,015,707	1 laporan	2,502,379,583	100.00%	92.68%	1 laporan	2,502,379,583	33.33%	103.40%	DPRKPP	Tidak Komulatif

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/dTahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 =8+9+10+11		13 = 12/7		14 = 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	3 dokumen	300,000,000	1 Dokumen	139,860,150	1 dokumen	580,000,000	0 dokumen	-	1 laporan	34,393,600	1 laporan	12,222,500	0 Laporan	-	1 laporan	46,616,100	100.00%	8.04%	1 laporan	46,616,100	33.33%	15.54%	DPRKPP
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		**93.37%**	**91.58%**	**DINAS PRKPP**				
																		Predikat kinerja		Tinggi		**DINAS PRKPP**				

Catatan : *)

Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Disusun
Nganjuk, 08 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

SUPARDI, SE
Pembina Tingkat I
NIP 19670812 199202 1 002